

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. PT ABC dalam mendiversifikasi usahanya di bidang properti mendirikan Perseoran Terbatas dan bekerjasama dengan Mr.Y dalam menjalani proyek perumahan"AAA". Selain itu PT ABC juga melakukan perencanaan pajak dengan menghindari pengalihan tanah dengan hanya membangun bangunan rumah dan infrastruktur diatas lahan milik Mr.Y sehingga atas kerjasama tersebut, PT ABC dapat menghindari BPHTB. Kemudian PT ABC juga melakukan pemisahan nilai jual tanah dengan nilai bangunan pada harga jual yang ditawarkan kepada pembeli.
2. Selain perencanaan pajak yang dilakukan PT ABC terdapat beberapa alternatif perencanaan pajak dalam rangka diversifikasi usaha yaitu:
 - a. Pemilihan badan usaha, dapat melalui PT ABC sendiri atau dengan mendirikan perseroan terbatas sebagai anak perusahaan.
 - b. Bentuk kerjasama, dapat melalui *Joint Operation* atau tidak melalui *Joint Operation*
 - c. Bentuk investasi, PT ABC selaku perusahaan induk dapat berinvestasi berupa pemberian pinjaman atau modal saham. Bentuk

pinjaman kepada anak perusahaan dapat berupa *direct loan* dan *back to back loan*. Sedangkan Mr.Y yang juga salah satu pemegang saham pada anak perusahaan PT ABC juga dapat berinvestasi melalui inbreng saham atas tanah yang ia miliki atau melalui transaksi jual-beli biasa.

Pada masing-masing alternatif tersebut dapat dikombinasikan sehingga menjadi suatu perencanaan pajak yang bersifat menyeluruh dalam rangka diversifikasi usaha.

3. Berdasarkan hasil analisis, perencanaan pajak yang dilakukan PT ABC dengan menghindari pengalihan hak tanah dari Mr.Y dan melakukan pemisahan nilai tanah dan nilai bangunan pada harga jual menghasilkan beban pajak yang paling minimal. Selain itu PT ABC dengan mendirikan perseroan terbatas sebagai anak perusahaan dan memberikan pinjaman sebagai sumber pembiayaan utama juga ikut berperan untuk mengefisienkan beban pajaknya. Namun atas perencanaan pajak yang dilakukan PT ABC merupakan perencanaan pajak yang belum di audit oleh otoritas pajak sehingga perencanaan pajak dengan menghindari pengalihan dan memisahkan nilai jual tanah dan bangunan masih mengandung resiko tidak dapat diterapkan. Namun selama mengacu pada *Substance over form principle* dimana suatu transaksi harus sesuai dengan kenyataan dibandingkan dengan bentuk yang disusun perusahaan melalui laporan akuntansi, resiko atas ketidakberhasilan perencanaan pajak tersebut dapat diminimalisasi. Mengenai pemberian pinjaman langsung dari PT ABC ke anak perusahaan menghasilkan beban pajak yang paling

efisien dibandingkan bentuk alternatif lainnya. Tetapi hal tersebut sangat beresiko mengenai penentuan besarnya bunga yang dibebankan pada anak perusahaan apakah terlalu kecil atau terlalu besar sehingga atas jumlah tersebut dianggap tidak wajar oleh petugas pajak. Selain perencanaan pajak yang dilakukan PT ABC terdapat alternatif lain yang menghasilkan beban pajak yang paling efisien dibandingkan dengan alternatif lain tetapi tidak seefisien dengan perencanaan pajak yang sudah dilakukan PT ABC yaitu dengan mendirikan perseroan terbatas, memberikan pinjaman kepada anak perusahaan melalui *back to back loan* dan melakukan kerjasama dengan Mr.Y melalui *Joint Operation*. Pada alternatif ini letak perbedaannya hanya pada beban pajak akibat pemberian pinjaman melalui *back to back loan* dan *joint operation* saja sebagai media dalam melakukan kerjasama. Akibat pemberian pinjaman melalui *back to back loan* menghasilkan beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan *direct loan* seperti yang telah dilakukan oleh PT ABC. Namun penerapan *back to back loan* tidak mengandung resiko mengenai kewajaran tingkat bunga pinjaman sehingga kerugian akibat sanksi perpajakan di masa mendatang dapat dihindari. Kelebihan *joint operation* adalah pada kewajiban *withholding tax* saja dimana dengan JO kewajiban pajak potong-pungut dapat diatur seadil mungkin misalnya dalam pemecahan kredit pajak pada masing-masing anggota. Dengan kata lain, fleksibilitas dalam pengaturan kewajiban pajak merupakan kelebihan JO. Hal ini didukung oleh ketentuan-ketentuan pajak yang mengatur perlakuan pajak pada JO. Jenis JO yang ideal berdasarkan bentuk

kerjasama antara PT ABC melalui anak perusahaan dengan Mr.Y selaku pemilik lahan adalah JO dengan jenis *Non-Administrative* JO. Atas pembentukan JO tersebut menimbulkan tambahan biaya administrasi yang relatif lebih hemat dibandingkan *Administratif* JO. Akibat tambahan biaya administrasi tersebut perusahaan harus mampu memperhitungkan berapa tambahan biaya administrasi tersebut dengan penghematan pajak dan keuntungan JO lainnya.

B. Saran

1. Dalam melakukan perencanaan pajak harus dilihat dari segala aspek yang tidak hanya aspek pajak saja melainkan dari aspek lainnya terutama aspek bisnis. Dalam melakukan perencanaan pajak tidak boleh mendistorsi kegiatan bisnis sehingga perencanaan pajak seharusnya berfungsi sebagai *pen-support* kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Oleh karena itu perencanaan pajak yang dilakukan harus masuk akal dari segi bisnis (*business reasonable*). PT ABC melalui perencanaan pajaknya dengan menghindari pengalihan tanah dan pemisahan nilai tanah dan bangunan harus membuktikan apakah perencanaan pajaknya disertai bukti-bukti yang kuat secara hukum dan bukan pelanggaran pajak sehingga resiko atas kegagalan perencanaan pajaknya dapat dihindari.
2. Berdasarkan alternatif-alternatif yang ada termasuk perencanaan pajak yang sudah diterapkan PT ABC terdapat perencanaan pajak yang paling efisien. Namun dalam melakukan perencanaan pajak melalui alternatif-alternatif perencanaan pajak hendaknya tidak hanya mempertimbangkan

berapa pajak yang dapat dihemat saja tetapi juga harus mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perencanaan pajak juga ditujukan untuk meminimalisasi resiko perpajakan yang akan merugikan perusahaan di masa mendatang.

3. Berdasarkan hasil analisis terdapat perencanaan pajak dengan beban pajak yang efisien dan dapat meminimalisasi resiko perpajakan dimasa mendatang. Akibat alternatif perencanaan pajak tersebut terdapat tambahan biaya administrasi terutama pada penerapan *Non-Administratif* JO. Agar beban administrasinya lebih hemat, PT ABC dapat melakukan perangkapan tugas pada staf-stafnya di anak perusahaan. Kegiatan operasional pada JO relatif tidak banyak karena JO tersebut hanya berfungsi sebagai wadah untuk pemenuhan kewajiban *witholding tax* secara bersama dengan pemilik lahan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.